



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *Urusan Kehutanan dan Perkebunan* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Kehutanan dan Perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Kehutanan dan Perkebunan.

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.
8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II DASAR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;
- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;

- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;
- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

BAB IV RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Urusan Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang Kehutanan; dan
 - b. Bidang Perkebunan.
- (3) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENERAPAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 15 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 15 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 29.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 29 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013**

URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013

A. BIDANG KEHUTANAN

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten.	Adanya plotting hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten		-	-	-	1x	1x	1x	Pemanfaatan sumbardaya hutan	Dilaksanakan pada 2005, sampai sekarang menggunakan data tersebut, dan belum ada rencana inventarisasi ulang	Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
2	Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.	Tersedianya Sistem Informasi kehutanan (numerik dan spasial)		tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	Pemanfaatan sumbardaya hutan		Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
3	Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	Waktu Proses		14 hari	14 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	Pemanfaatan sumbardaya hutan	Berkas lengkap	Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten (kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah PERUM perhutani) yang memiliki Ijin		20%	25%	30%	35%	40%	50%			

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		12x	12x	12x	12x	12x	12x	Pemanfaatan sumbardaya hutan	Kendala petugas lapangan masih kurang sehingga tidak bisa mengakomodir semua	Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
5	Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	Waktu Proses		14 hari	14 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	Pemanfaatan sumbardaya hutan	Berkas lengkap	Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		5/5 x 100% = 100%	7/7 x 100% = 100%	10/10 x 100% = 100%	12/12 x 100% = 100%	15/15 x 100% = 100%	20/20 x 100% = 100%		Setiap tahun minat masyarakat untuk memanfaatkan hutan meningkat	
		Persentase usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten (kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani) yang memiliki		20%	25%	30%	35%	40%	50%			

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		ijin										
6	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Rehabilitasi hutan dan lahan		Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
		Persentase hutan yang direhabilitasi		5%	8%	10%	15%	20%	25%			
7	Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Pemanfaatan sumbardaya hutan	Kerjasama dengan LSM kehutanan	Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
8	Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.	Persentase pemohon yang terlayani		-	-	-	-	-	-	Pemanfaatan sumbardaya hutan	Pemohon Belum ada	Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
		Waktu proses		14 hr	14 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr			
		Persentase usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (Appendix) CITES yang memiliki izin		100%	100%	100%	100%	100%	100%			

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013**

NO	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Rehabilitasi hutan dan lahan		Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
		Persentase hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten yang terlindungi		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10	Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Pemanfaatan sumbardaya hutan	Mengundang para pengelola hutan baik perorangan ataupun kelompok/perusahaan	Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
11	Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Pemanfaatan sumbardaya hutan	Masyarakat pengguna hutan datang sendiri ke kantor dinas	Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data
12	Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.	Frekuensi kegiatan		-	-	-	1x	1x	1x	Pemanfaatan sumbardaya hutan	Mulai dilaksanakan 2011 sesuai dengan kebutuhan masyarakat hutan.	Lakip, renstra SKPD dan Validasi Data

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013

B. BIDANG PERKEBUNAN

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.	Tersusunnya rencana kebutuhan lahan perkebunan		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
2	Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.	Tersusunnya peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
3	Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.	Persentase lahan perkebunan yang sudah dikembangkan		60%	63%	66%	69%	72%	75%	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Persentase lahan perkebunan yang sudah direhabilitasi		-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan karena lahan masih produktif	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Persentase lahan perkebunan yang sudah di optimalisasi dan dilakukan pengendalian		5%	7%	9%	11%	13%	15%	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
5	Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten.	Tersedianya data potensi dan pengelolaan lahan perkebunan		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
6	Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.	Luas lahan perkebunan yang sudah dikembangkan		43.366 ha	47.000 ha	50.500 ha	54.000 ha	57.500 ha	60.500 ha	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
7	Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten.	Persentase kawasan perkebunan terpadu		-	-	-	-	-	-		Belum terdata, umumnya perkebunan rakyat	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
8	Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten.	Terbentuknya sentra komoditas perkebunan		4	4	4	4	4	4	Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Sawit, karet, kelapa, lada	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
9	Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.	Tersedianya areal tanam		4	4	4	4	4	4	Peningkatan produksi perkebunan	Sawit, karet, kelapa, lada	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
10	Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.	Persentase sumber-sumber air untuk perkebunan yang telah dimanfaatkan		60%	60%	70%	70%	80%	80%	Peningkatan produksi perkebunan	Terutama perusahaan besar swasta	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
11	Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.	Persentase air permukaan dan air tanah untuk perkebunan yang telah dimanfaatkan		60%	60%	70%	70%	80%	80%	Peningkatan produksi perkebunan	Baru air permukaan	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
12	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA						PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
13	Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan	Jumlah sumber-sumber air untuk perkebunan		-	-	-	-	-	-	Peningkatan produksi perkebunan	Belum terdata		
14	Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam	
15	Bimbingan penggunaan pupuk.	Frekuensi kegiatan		3x/mg	3x/mg	3x/mg	3x/mg	3x/mg	3x/mg	Peningkatan produksi perkebunan	Dilakukan oleh penyuluh	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam	
16	Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam	
17	Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.	Jumlah unit usaha pelayanan pupuk yang sudah dilakukan pengembangan dan pembinaan		12	12	13	13	14	15	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam	
18	Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam	
19	Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.	Jumlah media informasi		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan	Lewat pertemuan penyuluh	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam	
		Frekuensi kegiatan		2x	2x	2x	2x	2x	2x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam	
20	Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.	Frekuensi kegiatan		3x/mg	3x/mg	3x/mg	3x/mg	3x/mg	3x/mg	Peningkatan produksi perkebunan	Dilakukan oleh penyuluh	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam	
21	Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.	Terlaksananya kebijakan penggunaan pestisida		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
23	Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.	Jumlah unit usaha pelayanan pestisida yang telah dikembangkan		12	12	13	13	14	15	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
24	Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
25	Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.	Frekuensi kegiatan		2x	2x	2x	2x	2x	2x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Jumlah Media informasi		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
26	Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.	Frekuensi kegiatan		3x/mg	3x/mg	3x/mg	3x/mg	3x/mg	3x/mg	Peningkatan produksi perkebunan	Dilakukan oleh penyuluh	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
27	Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.	Terlaksananya kebijakan alat dan mesin perkebunan		1	1	1	1	1	1	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
28	Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.	Teridentifikasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan		2x	2x	2x	2x	2x	2x	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
29	Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.	Jumlah alat dan mesin perkebunan sesuai standar		5	5	5	5	5	5	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan	1 unit 4 in 1, 4 unit kecil	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	TARGET KINERJA						PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30	Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan	Terlaksananya penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan		1	1	1	1	1	1	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
31	Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		2x	2x	2x	2x	2x	2x	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
32	Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
36	Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		12x	12x	12x	12x	12x	12x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
37	Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.	Terlaksananya kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
38	Pemantauan benih impor wilayah kabupaten	Frekuensi kegiatan		12x	12x	12x	12x	12x	12x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
39	Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		12x	12x	12x	12x	12x	12x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
40	Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.	Frekuensi kegiatan		12x	12x	12x	12x	12x	12x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
41	Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	TARGET KINERJA						PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
42	Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
43	Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
44	Pemberian izin produksi benih perkebunan.	Waktu Proses		2 hr	2 hr	2 hr	2 hr	2 hr	2 hr	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Persentase pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Adanya tempat/alamat pengaduan masyarakat		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan	Langsung ke dinas	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Persentase usaha produksi benih perkebunan yang memiliki izin		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan produksi perkebunan	Hanya untuk yang diperjual-belian	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
45	Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.	Frekuensi kegiatan		12x	12x	12x	12x	12x	12x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
48	Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.	Adanya sistem informasi perbenihan yang berkualitas		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan	Masih manual, lwt Pengawas Benih/Dinas	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Tersedianya data perbenihan yang up to date		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
49	Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.	Jumlah balai benih		-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan, masih cukup membeli dari luar	
		Persentase balai benih yang terkelola		-	-	-	-	-	-			
50	Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.	Frekuensi kegiatan		12x	12x	12x	12x	12x	12x	Peningkatan produksi perkebunan	Sawit dan karet	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
51	Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.	Frekuensi kegiatan		12x	12x	12x	12x	12x	12x	Peningkatan kesejahteraan petani		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
52	Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.	Frekuensi kegiatan		2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	Peningkatan produksi perkebunan	Dilakukan oleh penyuluh	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
53	Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.	Frekuensi kegiatan		-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan, karena Kelompok Tani punya KUD sendiri	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
55	Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
56	Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA						PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57	Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.	Jumlah media informasi		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan	Melalui petugas OPT	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
58	Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
59	Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		4x	4x	4x	4x	4x	4x	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
60	Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten.	Persentase gangguan usaha perkebunan yang tertangani		80%	80%	80%	80%	80%	80%	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
61	Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten	Waktu Proses		3 bln	3 bln	2 bln	2 bln	1 bln	1 bln	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Persentase pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan produksi perkebunan	Sepanjang lahan masih tersedia	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Adanya kantor/alamat pengaduan masyarakat		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan	Ke Dinas	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
		Persentase usaha perkebunan yang memiliki ijin		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan produksi perkebunan	Hanya perusahaan besar swasta	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	TARGET KINERJA						PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
62	Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Peningkatan produksi perkebunan	Untuk yg dlm thp pembangunan, yg sudah operasional 3 thn sekali	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
63	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		2x	2x	2x	2x	2x	2x	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
64	Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
65	Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
66	Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
67	Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		1x	1x	1x	1x	1x	1x	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
69	Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Dilakukan oleh penyuluh	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	TARGET KINERJA						PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
70	Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten	Frekuensi kegiatan		2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	Peniingkatan pemasaran hasil perkebunan	Dilakukan oleh penyuluh	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
71	Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan, alat-alatnya ada di perusahaan besar swasta	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
72	Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.	Jumlah media informasi		1	1	1	1	1	1	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Melalui penyuluh/ Dinas	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
73	Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Dilaksanakan oleh penyuluh	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
74	Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	2x/mg	Peniingkatan pemasaran hasil perkebunan	Dilaksanakan oleh penyuluh	Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam
76	Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.	Jumlah media informasi		-	-	-	-	-	-		Petani langsung menjual ke PBS	
77	Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		12x	12x	12x	12x	12x	12x	Peniingkatan pemasaran hasil perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
79	Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten	Frekuensi kegiatan		-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan. Hasil langsung dipasarkan	
80	Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten.	Tersedianya data statistic perkebunan		1	1	1	1	1	1	Peningkatan produksi perkebunan		Bid. Perkebunan Dinhutbun-tam

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP